

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY DI UKRAINA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan ENP di Ukraina yang diawali dengan sistematika kerja ENP dan isi penerapan dari kebijakan ENP tersebut.

A. Sistematika Kerja ENP

Sementara mempromosikan kerja sama dan reformasi, ENP akan menggunakan instrumen metodologi transisi seperti di Eropa Timur-Tengah dan Tenggara. Pada awal proses, Komisi menyiapkan laporan negara yang menilai situasi politik dan ekonomi dan memutuskan kapan dan bagaimana kemungkinan untuk memperdalam hubungan dengan negara itu. Tahap berikutnya adalah pengembangan Action Plan atau Rencana Aksi yang dinegosiasikan dengan masing-masing negara dan menentukan agenda reformasi melalui prioritas tindakan jangka pendek dan menengah. Sementara cakupan Rencana Aksi bersifat komprehensif, "prioritas untuk tindakan" fokus pada reformasi politik serupa dengan yang ditekankan pada negara-negara yang masuk dalam ENP.

Tahap pelaksanaan akan dipantau secara teratur melalui sub-komite bersama dan laporan tahunan Komisi Eropa, serupa dengan laporan kemajuan untuk negara-negara yang bergabung di ENP. Ketika pemantauan menunjukkan kemajuan signifikan dalam memenuhi prioritas, insentif dapat ditinjau, Rencana Aksi dapat disesuaikan, atau perjanjian bilateral dapat diganti dengan Perjanjian Lingkungan. Menurut Cremona, "meskipun tidak secara khusus dirancang untuk mempersiapkan negara-negara ini untuk keanggotaan Uni Eropa, pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi kemungkinan akan meningkatkan kesiapan negara-negara tersebut untuk mengajukan aplikasi keanggotaan, jika mereka akhirnya memutuskan untuk melakukannya"

Dengan menetapkan prioritas yang jelas dan spesifik dalam Rencana Aksi, dan secara hati-hati memantau pelaksanaannya, Uni Eropa akan memberikan fokus dan mendorong reformasi di negara-negara mitra. Pelaksanaan putaran pertama Rencana Aksi dimulai pada tahun 2004 dengan tujuh mitra yang Perjanjiannya berlaku pada saat itu (Israel, Yordania, Moldova, Maroko, Otoritas Palestina, Tunisia dan Ukraina). (Kahraman, 2005)

1. Promosi Demokrasi

Demokrasi memiliki daya tarik universal di antara orang-orang dari setiap kelompok etnis, kelompok agama, dan setiap wilayah di dunia. Prinsip-prinsip yang berkaitan dengan demokrasi yaitu perlindungan hak-hak minoritas, kebebasan berbicara, menghormati aturan hukum, kebebasan berserikat, kebebasan pers, kebebasan beragama, hak milik pribadi dan pemerintahan yang bertanggung jawab. (Sherrill)

Sementara demokrasi secara luas dianggap sebagai sistem pemerintahan yang ideal, promosi demokrasi sebagai tujuan kebijakan luar negeri menjadi semakin dapat diterima di sebagian besar masyarakat internasional. Sebagaimana Dahl menekankan, karena kebutuhan keamanan dan stabilitas, negara-negara bertujuan untuk mencegah aturan oleh otokrat yang kejam dan jahat di negara-negara lain.

Demokrasi menjamin warga mendapatkan hak fundamental, menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas, membantu orang melindungi kepentingan fundamental mereka sendiri, memberikan kesempatan maksimum untuk penentuan nasib sendiri, memberikan kesempatan maksimum untuk pelaksanaan tanggung jawab moral, mendorong pembangunan manusia, memupuk tingkat kesetaraan politik yang relatif tinggi dan mendorong perdamaian. Menurut Dahl, demokrasi tidak saling melawan satu sama lain dan mereka menghasilkan kemakmuran dalam geografi mereka sendiri. (McFaul, 2004-2005).

Metode promosi demokrasi dapat disalurkan top-down atau bottom-up. Saluran top-down untuk promosi demokrasi

mengacu pada promosi demokrasi yang diarahkan pada lingkup politik, lembaga negara dan elit politik. Para elit memiliki peran sentral dalam meningkatkan demokratisasi. Mereka yakin dan terlatih dalam perilaku demokratis dan diharapkan untuk membangun institusi demokratis. Para elit bernegosiasi dan tawar menawar di arena internasional dengan aktor pro-demokrasi. Namun strategi promosi demokrasi menghadapi masalah bahwa transisi ke rezim demokratis adalah periode destabilisasi di mana elit didorong untuk menyeimbangkan ketegangan internal.

Di sisi lain, saluran bottom-up melibatkan promosi demokrasi yang diarahkan pada masyarakat sipil. Demokratisasi dari bawah terdiri dari penargetan organisasi-organisasi sosial dan sosio-ekonomi, asosiasi dan gerakan untuk menjadi pro-demokrasi. Sebagai contoh masyarakat sipil pro-demokratis yang dinamis dapat mempromosikan demokrasi dengan mendidik warga ke dalam kesadaran politik. Ini membutuhkan kesadaran demokrasi di dalam masyarakat sipil dan kesediaan untuk bekerja melawan rezim diktator untuk mendukung demokrasi ini. (Stetter, 2003) Jika masyarakat sipil lemah dan tidak berorientasi demokratis promosi demokrasi melalui bottom-up tidak mungkin berhasil. (Silander, 2005)

Demokrasi dipromosikan di dalam negeri maupun di dunia internasional; baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pembangunan horizontal mengacu pada konsolidasi norma di rumah, sedangkan perkembangan vertikal norma mengacu pada penguatan demokrasi kepada orang lain. Penyebaran demokrasi di rumah dapat meluas ke negara-negara lain (Silander, 2005). Beberapa organisasi internasional telah terlibat dalam mempromosikan demokrasi. Misalnya, Uni Eropa, NATO dan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) mempromosikan demokrasi di Eropa tetapi juga secara global. Promosi demokrasi oleh para aktor ini telah memperkuat dan melegitimasi institusi dan nilai domestik di luar negeri.

Ada kecenderungan yang meningkat dalam mengeksplorasi peran organisasi internasional sebagai promotor demokrasi dan stabilitas. Uni Eropa menerapkan pendekatan yang sangat berbeda untuk promosi demokrasi dari organisasi internasional yang lainnya. (Antoaneta & Pridham, 2004-2005)

Kelompok-kelompok seperti Institut Republikan Internasional, Institut Demokrasi Nasional, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan Carter Center bertujuan untuk mempromosikan demokrasi. Mereka secara teratur mengirim pemantau untuk mengawasi pemilihan di negara-negara. Banyak dari organisasi yang sama ini juga mulai memberikan bantuan teknis kepada negara-negara demokrasi baru, untuk berbagi pengalaman, dan memberi nasihat pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Para aktor eksternal tersebut memberikan dukungan material langsung dan bantuan teknis kepada komisi pemilu, parlemen, pengadilan, pemantau hak asasi manusia, partai politik, serikat pekerja, dan asosiasi bisnis.

Dengan mendukung LSM-LSM yang berkomitmen pada norma-norma demokratis, lembaga-lembaga asing ini membantu untuk mengubah keseimbangan kekuasaan dalam politik domestik demi terciptanya demokrasi . Program TACIS untuk Rusia dan negara-negara CIS lainnya, program EU's PHARE (Polandia dan Hongaria untuk Restrukturisasi Ekonomi) di Eropa Timur, lembaga-lembaga partai di Jerman, Westminster Foundation di Inggris, Institute for Democracy di Eropa Timur juga memberikan promosi demokrasi. Dan ada fakta bahwa total sumber daya Eropa yang ditujukan untuk promosi demokrasi melebihi anggaran AS. (McFaul, 2004-2005).

2. Promosi Pasar Bebas

ENP memiliki implikasi ekonomi yang penting karena mempertimbangkan peningkatan hubungan perdagangan preferensial, peningkatan bantuan keuangan dan teknis. ENP juga menawarkan kepada negara-negara tetangga prospek

kepemilikan di Pasar Internal atau *Internal Market* Uni Eropa berdasarkan pendekatan legislatif dan peraturan, partisipasi dalam sejumlah program Uni Eropa dan hubungan interkoneksi dan fisik yang lebih baik dengan Uni Eropa

Manfaat ekonomi dari proses ini diharapkan menjadi substansial dan bertambah baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pengurangan hambatan tarif dan non-tarif untuk perdagangan harus membawa keuntungan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan melalui integrasi pasar yang meningkat. Efek tidak langsung terutama di negara-negara mitra bahkan lebih besar.

Dengan membawa negara tetangga lebih dekat ke model ekonomi Uni Eropa juga melalui penerapan praktik terbaik internasional, ENP dan khususnya perluasan yang diusulkan dari pasar internal akan meningkatkan iklim investasi di negara-negara mitra. Ini akan memberikan lingkungan yang lebih transparan, stabil dan memungkinkan untuk pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh sektor swasta. Dampak positif pada arus masuk investasi langsung asing diharapkan sebagai akibat dari lingkungan kebijakan yang lebih menguntungkan, mudahnya perdagangan dan murahnya biaya transaksi, biaya tenaga kerja relatif yang menarik dan risiko berkurang.

Rencana Aksi atau *Action Plan* akan menetapkan cara dan sarana untuk memastikan bahwa Uni Eropa dan mitranya mendapatkan manfaat penuh dari ketentuan perdagangan yang terkandung dalam Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama atau Asosiasi yang ada. Rekening jatuh tempo juga akan diambil dari inisiatif di tingkat regional.

Pendekatan legislatif dan peraturan akan dihitung berdasarkan prioritas yang disepakati bersama dengan fokus pada unsur-unsur yang paling relevan dari akuisisi untuk merangsang perdagangan dan integrasi ekonomi dengan mempertimbangkan struktur ekonomi negara mitra dan tingkat harmonisasi saat ini dengan Undang-undang Uni Eropa. Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama dan Asosiasi

keduanya berisi ketentuan tentang pendekatan legislatif di wilayah yang luas.

ENP juga memperkirakan pembukaan pasar yang lebih besar sesuai dengan prinsip-prinsip WTO. Dalam konteks Proses Barcelona, area perdagangan bebas untuk barang telah disetujui dan liberalisasi asimetris telah dimulai. ENP akan menyediakan cara dan sarana untuk memperdalam liberalisasi perdagangan dan integrasi regional dalam koherensi dengan kemitraan Euromed. Untuk negara-negara tetangga Timur, prioritasnya tetap lebih penuh pelaksanaan ketentuan terkait perdagangan PCA, akses ke WTO (dalam kasus Ukraina) atau implementasi penuh perjanjian akses ke WTO (dalam kasus Moldova) bersama dengan lanjutan reformasi ekonomi. Integrasi perdagangan dan hubungan ekonomi yang lebih dalam seperti yang diperkirakan dalam PCAs akan dipertimbangkan.

Rencana Aksi akan menetapkan langkah-langkah konkret untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang disediakan dalam kerangka kerja ini. Langkah-langkah ini akan bergantung pada kebutuhan, kapasitas, dan prioritas kebijakan ekonomi masing-masing pasangan. Langkah-langkah yang dibahas di bawah ini akan diperkenalkan secara progresif sesuai dengan masing-masing pasangan

Mengenai barang, langkah-langkah harus diambil untuk meningkatkan kerja sama administratif dan memastikan penghapusan hambatan non-tarif secara bertahap untuk perdagangan dan pengembangan infrastruktur yang sesuai. Pergerakan produk industri dapat difasilitasi melalui konvergensi dengan undang-undang dan struktur peraturan Uni. Hal ini dapat dilengkapi dengan kesimpulan Kesepakatan tentang Penilaian Kesesuaian dan Penerimaan Produk Industri (ACAA) antara Masyarakat dan mitra individu berdasarkan pengalaman dengan inisiatif saat ini terhadap negara-negara tetangga di Mediterania. Pendekatan legislatif di bidang kepabeanan bersama dengan pembangunan kapasitas dan modernisasi, termasuk komputerisasi juga akan berkontribusi pada fasilitasi

perdagangan. Untuk mitra Mediterania, tindakan ini sejalan dengan rekomendasi Palermo. Tindakan untuk memberantas penipuan di daerah pabean dan untuk menetapkan pengawasan pungutan berdasarkan risiko serta langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan keamanan barang juga akan dimasukkan dalam Rencana Aksi.

Untuk produk pertanian, konvergensi dengan standar Uni Eropa untuk pengendalian sanitasi dan fito-saniter akan sangat meningkatkan perdagangan timbal balik antara negara-negara mitra dan Uni Eropa. Bertukar informasi dan kerjasama yang erat dalam organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mengendalikan penyakit hewan dan tumbuhan serta memperbaiki kondisi sanitasi untuk melindungi konsumen adalah prioritas. Sebagian besar negara juga perlu meningkatkan kapasitas administratif untuk memastikan tingkat keamanan pangan agar mereka dapat mengakses pasar Uni Eropa

Tujuan perdagangan bebas dalam layanan dengan di antara negara-negara mitra juga akan membutuhkan pendekatan legislatif lebih lanjut di bidang-bidang seperti hukum perusahaan, aturan akuntansi dan audit. Kerangka peraturan kehati-hatian yang komprehensif dikombinasikan dengan badan pengawas yang independen dan efisien, sangat penting untuk bidang jasa keuangan. Ini akan menjadi kunci untuk penciptaan bisnis dan promosi investasi sehingga negara-negara ini memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi di arena bermain yang seimbang. Dalam kombinasi dengan langkah-langkah di atas, akses ke pasar keuangan Eropa harus seiring waktu menambah stabilitas pasar keuangan mitra dan membantu meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Semakin liberalisasi pergerakan modal akan memberikan peluang baru

Tujuan meningkatkan iklim investasi termasuk dengan memastikan transparansi, prediktabilitas, dan penyederhanaan kerangka kerja peraturan negara-negara ini akan membantu memfasilitasi dan meningkatkan investasi dua arah. Perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap

investor merupakan elemen penting dalam proses ini. Tindakan yang meningkatkan dialog sistematis yang mencakup semua masalah terkait investasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk meningkatkan lingkungan investasi bilateral dan mengurangi hambatan administratif bagi pengembangan bisnis. Penguatan fungsi sistem peradilan juga akan berkontribusi pada iklim investasi yang lebih baik.

Konvergensi regulasi dalam disiplin utama yang berhubungan dengan perdagangan akan membawa manfaat ekonomi, baik dalam hal reformasi di negara-negara mitra dan dalam hal peningkatan iklim investasi. Secara khusus, peningkatan tingkat perlindungan efektif terhadap hak kekayaan intelektual dan industri serta penegakan yang efektif dari hak-hak tersebut bersama dengan konvergensi regulasi dan peningkatan akses pasar di bidang pengadaan publik kemungkinan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan tingkat investasi. Tindakan juga dapat diambil untuk meningkatkan harmonisasi dan keberlanjutan sistem statistik.

Selain itu, mitra harus didorong untuk menerapkan disiplin kompetisi melalui otoritas persaingan independen dengan kekuatan dan sumber daya yang memadai serta pelatihan yang tepat. Konvergensi terhadap pendekatan dan definisi yang sebanding pendekatan legislatif terhadap anti-trust serta peraturan bantuan Negara pada akhirnya akan diperlukan bagi para mitra untuk maju ke arah konvergensi dengan Pasar Internal. Langkah-langkah tersebut juga akan menguntungkan pasar domestik serta memfasilitasi perdagangan.

Tindakan untuk memodernisasi dan meningkatkan transparansi dalam sistem pajak termasuk melalui konvergensi dengan Kode Etik untuk Perpajakan Bisnis Uni Eropa sesuai dengan persyaratan WTO, penerapan konvensi untuk menghindari perpajakan ganda akan meningkatkan iklim bisnis. Penguatan administrasi pajak dan peningkatan

kerjasama di antara mereka juga akan mendorong berfungsinya ekonomi pasar. (Communities C. o.)

B. Implementasi ENP di Ukraina

1. Implementasi Promosi Demokratisasi

Pemilihan presiden pada bulan Mei dan pemilihan parlemen pada bulan Oktober 2014 dianggap oleh pengamat internasional dan nasional telah dilakukan sebagian besar sesuai dengan komitmen internasional Ukraina dengan hanya insiden kecil yang dilaporkan pelanggaran atau penipuan termasuk pembelian suara tidak langsung dan kekerasan. Pemilihan tidak dapat diadakan di wilayah Krimea dan Sevastopol yang dianeksasi secara ilegal, atau di bagian wilayah Donetsk dan Luhansk yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok bersenjata ilegal. Pemilihan dewan kota dan walikota di sejumlah kota di mana pos itu kosong juga terjadi, pada bulan Mei 2014.

Berkenaan dengan reformasi perundang-undangan pemilihan, hanya undang-undang tentang pemilihan presiden yang secara signifikan ditingkatkan, dengan amandemen relevan yang diadopsi oleh parlemen pada Maret 2014. Hal ini menjawab sejumlah keprihatinan yang dikemukakan oleh para ahli pemilihan internasional dan domestik. Beberapa amandemen kecil terhadap undang-undang pemilihan parlemen juga diadopsi pada Oktober 2014 mengurangi jumlah defisiensi. (Policy, 2015)

Tidak ada kemajuan yang dibuat pada kebutuhan lama untuk reformasi komprehensif dari undang-undang tentang pemilihan parlemen, pemilihan lokal, referendum nasional dan lokal sejalan dengan rekomendasi oleh OSCE / ODIHR dan Dewan Komisi Venesia Eropa.

Pada Februari 2014, konstitusi 2004 dipulihkan melalui resolusi parlemen. Bersamaan dengan itu komisi parlementer adhoc untuk reformasi konstitusi dibentuk untuk bekerja pada pembagian kekuasaan horizontal reformasi desentralisasi dan reformasi peradilan. Komisi tidak

mengusulkan amandemen konstitusi yang seragam sebelum pemilihan presiden. Amandemen yang diusulkan oleh Presiden Poroshenko setelah pemilihannya tidak dilakukan pemungutan suara parlemen sebelum pemilihan parlemen awal. Mereka dianalisis oleh Komisi Venesia yang mengeluarkan penilaian beragam pada bulan Oktober 2014.

Pada pertengahan Januari 2014, undang-undang yang sangat membatasi kebebasan berkumpul dan kebebasan fundamental lainnya diperkenalkan untuk mengekang protes nasional. Polisi anti huru hara menyerang 'Maidan' dengan keras beberapa kali. Protes memuncak selama paruh kedua Februari 2014 menyebabkan hingga seratus orang tewas. Undang-undang yang membatasi sebagian ditarik satu minggu kemudian dan sepenuhnya dicabut setelah perubahan pemerintahan pada Februari 2014. Demonstrasi dan manifestasi sering terjadi pada tahun 2014, tetapi sejak Mei tidak ada insiden kekerasan besar yang terjadi. Insiden tragis yang mengakibatkan kematian lebih dari 40 demonstran anti-'Maidan' di Odessa pada bulan Mei sedang diselidiki.

Pihak berwenang Ukraina menyetujui usulan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Eropa untuk membentuk Panel Penasihat Internasional, yang meliputi penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia pada periode dari November 2013 hingga Februari 2014. Mandatnya kemudian diperluas untuk mencakup peristiwa di Odessa. Parlemen mengakui yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atas kejahatan yang dilakukan antara November 2013 dan Februari 2014.

Awal tahun 2014 melihat situasi yang sangat sulit mengenai kebebasan berekspresi dan kebebasan media, dengan sebagian besar media berada di bawah kendali otoritas pusat negara dan jurnalis menjadi target fisik untuk polisi anti huru-hara. Situasi ini secara substansial meningkat setelah Februari 2014, kecuali di bagian-bagian wilayah Ukraina yang secara ilegal dianeksasi oleh Federasi Rusia (Crimea dan Sevastopol) atau berada di bawah kendali kelompok-kelompok bersenjata ilegal (bagian dari wilayah

Donetsk dan Luhansk). Undang-undang tentang penyiaran publik diadopsi oleh parlemen, yang bertujuan untuk mengubah layanan penyiaran negara menjadi layanan publik yang independen. Namun, pelaksanaannya secara signifikan tertunda karena upaya oleh berbagai kelompok kepentingan untuk menggagalkan proses pembentukan layanan penyiaran publik.

Kurangnya transparansi kepemilikan media tetap menjadi masalah dan kerangka legislatif yang tepat pada kepemilikan media tidak dibuat pada tahun 2014.

Penyiaran beberapa saluran berita dari Rusia ditangguhkan oleh pengadilan, karena alasan keamanan nasional. Saluran TV Ukraina ditangguhkan di Krimea / Sevastopol yang dianeksasi secara ilegal dan di wilayah itu di bawah kendali kelompok-kelompok bersenjata ilegal. Kasus-kasus penculikan, pembunuhan, dan penganiayaan para jurnalis di daerah-daerah Ukraina ini sering dilaporkan. Kebebasan beragama atau berkeyakinan juga telah sangat terpengaruh di wilayah-wilayah ini, dengan sasaran penganiayaan komunitas agama tertentu.

Pada April 2014, parlemen mengadopsi undang-undang tentang pemulihan kepercayaan di pengadilan, mengubah proses di mana para hakim secara berlebihan berada di bawah para presiden pengadilan dan membuat para hakim pengadilan dan hakim independen dari otoritas politik. Semua presiden pengadilan yang berkuasa diberhentikan meskipun banyak dari mereka yang terpilih kembali. Sebuah rancangan strategi reformasi sektor peradilan dikembangkan dengan dukungan Uni Eropa.

Pada bulan Oktober, parlemen mengadopsi undang-undang baru tentang penuntutan publik yang sebagian besar memperhitungkan rekomendasi Komisi Venesia.

Beberapa langkah diambil oleh pemerintah, administrasi kepresidenan dan parlemen untuk menerapkan kebijakan antikorupsi. Perubahan pada undang-undang anti-korupsi diadopsi pada bulan Mei 2014, memperkuat ketentuan pengungkapan aset oleh:

- a. memperkenalkan mekanisme kontrol eksternal;
- b. mengkriminalisasi semua jenis suap (aktif dan pasif);
- c. menambahkan aturan tentang korupsi di sektor swasta dalam hal orang hukum; dan
- d. meningkatkan hukuman.

Selain itu, perlindungan whistle-blower juga diperkuat. Undang-undang komprehensif yang terpisah diadopsi pada pengadaan publik, yang mencakup aturan transparansi, pemberian kontrak publik, dan ruang lingkup pengadaan entitas. Ukraina menduduki peringkat ke-142 dari 175 dalam indeks persepsi korupsi Transparency International 2014 (2013: 144 dari 177).

Paket lain dari undang-undang anti-korupsi diadopsi oleh parlemen pada bulan Oktober, termasuk undang-undang tentang Biro Anti-Korupsi Nasional, pembentukan Badan Pencegahan Korupsi, pengungkapan para pemilik perusahaan yang sebenarnya, memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan pembiayaan untuk proliferasi WMD, dan mencegah korupsi. Strategi nasional tentang korupsi masih perlu didukung oleh rencana implementasi yang menetapkan langkah-langkah tepat, tenggat waktu, indikator, tanggung jawab dan indikasi sumber daya yang tersedia.

Reformasi penegakan hukum, termasuk reformasi kepolisian, tidak mengalami kemajuan. Peran layanan penegakan hukum, termasuk pasukan polisi khusus, dalam upaya kekerasan untuk membubarkan para demonstran damai di unjuk rasa 'Euromaidan' pada paruh pertama tahun 2014 dan kegagalan untuk mencegah partisipasi aktif oleh beberapa operasi penegak hukum yang tidak setia pada tahap awal destabilisasi di timur Ukraina menggarisbawahi perlunya reformasi di sektor ini. Pemerintah menyetujui strategi reformasi polisi, yang diusulkan pada bulan Oktober oleh Menteri Dalam Negeri.

Mengenai kontrol demokratis atas pasukan bersenjata dan keamanan, Ukraina mulai mereformasi militernya untuk menciptakan tentara profesional dengan tentara kontrak sebelum aneksasi Crimea dan Sevastopol. Reformasi pada tahap yang sangat awal dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Setelah aneksasi berlangsung, rancangan undang-undang secara resmi diperkenalkan kembali dan unit-unit sukarelawan diselenggarakan di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Pada beberapa kesempatan, pemimpin mereka menyatakan ketidakpuasan dengan kebijakan resmi.

2. Implementasi Promosi Pasar Bebas

Setelah dua tahun stagnasi, ekonomi Ukraina memasuki resesi yang mendalam pada tahun 2014 karena konflik di bagian timur negara itu. Krisis ini tercermin dalam depresiasi mata uang yang tajam dan investasi dan konsumsi yang lebih rendah. Hilangnya kapasitas produktif di timur Ukraina, pusat industri negara itu, berkontribusi pada kontraksi PDB oleh sekitar 7,1% 1 pada tahun 2014.

Depresiasi mata uang ditambah dengan peningkatan yang signifikan dalam harga administrasi menghasilkan percepatan inflasi IHK menjadi sekitar 24,9% year-on-year pada Desember 2014. Meskipun pengenalan berbagai tindakan korektif (baik di sisi pendapatan dan pengeluaran), posisi fiskal memburuk karena defisit fiskal secara keseluruhan termasuk defisit monopoli gas milik negara Naftogaz naik menjadi sekitar 10% dari PDB pada tahun 2014 dari 6,7% setahun sebelumnya. Defisit anggaran yang tinggi ini ditambah dengan depresiasi mata uang dan dana yang dialokasikan untuk mendukung sektor perbankan menyebabkan peningkatan yang kuat dari utang publik mencapai sekitar 72,4% dari PDB pada akhir 2014 dari 40,3% pada tahun 2013.

Di sisi eksternal, penyesuaian defisit transaksi berjalan (menjadi sekitar 4,0% dari PDB dari 8,7% pada tahun 2013)

karena berkurangnya impor disertai oleh arus keluar sektor swasta yang besar dan pembayaran untuk tunggakan gas. Akibatnya, cadangan internasional bruto Ukraina turun hampir 60% (EUR 10 miliar) pada tahun 2014 menjadi hanya 6,2 miliar pada akhir tahun atau hanya 1,4 bulan impor tahun depan. Hal ini terjadi meskipun dukungan resmi mendekati EUR 7 miliar yang diterima Ukraina pada tahun ini sebagai bagian dari program dukungan internasional IMF untuk negara tersebut. Uni Eropa mencairkan pinjaman senilai 1,36 miliar euro kepada Ukraina di bawah dua program bantuan keuangan makro dan memberikan 250 juta EUR dalam bentuk hibah dukungan anggaran untuk pembangunan institusi.

Tingkat pengangguran mencapai sekitar 9,2%, naik dari 7,2% pada tahun 2013 dan sebelumnya kira-kira dua kali lebih tinggi untuk orang muda. Pekerjaan informal tetap substansial. Pihak berwenang memutuskan pada April 2014 untuk mengurangi ukuran layanan publik negara sebesar 30% dan untuk mengurangi manfaat bagi pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mereka untuk mereformasi administrasi publik dan mengingat kendala anggaran yang signifikan yang dihadapi negara. Pada bulan Juni, banyak lembaga negara ditutup atau bergabung. Situasi di Ukraina timur menghasilkan keadaan darurat sosial baru. Anggaran 2015 yang disiapkan pemerintah membuat ketentuan untuk pemotongan besar dalam manfaat sosial. Adopsi dari Kode Buruh yang direvisi masih tertunda.

Hampir tidak ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada IDPs dan manfaat finansial sederhana yang diberikan kepada IDPs di bawah Keputusan 505 sudah habis karena kurangnya dana.

Pembangunan berkelanjutan masih belum ditangani secara sistematis. Karena kurangnya strategi pertanian tunggal dan komprehensif, Uni Eropa mendukung inisiatif untuk meluncurkan proses inklusif untuk mendukung pengembangan strategi untuk pertanian dan pembangunan pedesaan yang mencakup 2015-2020.

Meskipun kontraksi tahunan yang signifikan (-27%), EU-28 mengkonsolidasikan posisinya sebagai mitra dagang utama Ukraina, dengan perdagangan barang secara keseluruhan sebesar EUR 30,92 miliar pada tahun 2014.

Sementara pada tahun 2013 Uni Eropa dan Federasi Rusia telah mewakili masing-masing 27% dan 24% dari total ekspor Ukraina, gambar tersebut berubah secara substansial pada tahun 2014 dengan Uni Eropa mewakili hampir sepertiga dari ekspor Ukraina dan Rusia hanya 18%. Ekspor ke Uni Eropa yang tetap ke tingkat yang sama seperti pada tahun 2013 memberikan kontribusi untuk mengkompensasi perdagangan jatuh antara Ukraina dan Rusia meskipun jenis barang yang diekspor ke Uni Eropa (terutama produk pertanian dan bahan baku) berbeda dengan yang diekspor ke Rusia (terutama mesin dan barang-barang manufaktur).

Pergeseran relatif dalam arus perdagangan eksternal menuju Uni Eropa dapat dijelaskan sebagian oleh peluang yang diciptakan oleh akses preferensial ke pasar UE yang diberikan oleh langkah-langkah perdagangan otonom (ATM) sebagian oleh dampak buruk dari tindakan perdagangan terbatas yang diberlakukan oleh Federasi Rusia. Penurunan impor dan perlambatan secara keseluruhan dalam belanja konsumen telah secara tajam mengurangi defisit perdagangan keseluruhan Ukraina menjadi USD 0,5 miliar pada tahun 2014, dibandingkan dengan USD 19,6 miliar pada tahun 2013.

Pemerintah saat ini awalnya mengadopsi sejumlah langkah yang ditujukan untuk meningkatkan perdagangan Uni Eropa-Ukraina. Namun, langkah-langkah pembatasan perdagangan yang baru diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap kondisi makro ekonomi yang kritis. Mereka berisiko membalikkan perbaikan dalam hubungan perdagangan dan memperburuk iklim bisnis.

Di bidang pergerakan bebas barang dan regulasi teknis, pemerintah baru memperbarui upaya untuk bergerak maju dalam reformasi regulasi teknis. Draf strategi untuk pengembangan sistem regulasi teknis hingga 2018 dan

rencana aksi terkait telah disiapkan. Ini sejalan dengan ketentuan yang relevan dari Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Ukraina. Versi baru yang ditunggu-tunggu dari undang-undang tentang standarisasi dan metrologi telah diadopsi, seperti juga undang-undang baru tentang peraturan teknis dan penilaian kesesuaian. Pekerjaan dilanjutkan dengan merevisi legislasi teknis lainnya, tetapi ini tidak menghasilkan adopsi peraturan baru (lebih karena kompleksitas teknis daripada kurangnya kemauan politik). Kerjasama yang sedang berlangsung di bidang ini termasuk program senilai 45 juta euro untuk mempromosikan perdagangan timbal balik dengan menghapus hambatan teknis untuk perdagangan antara Ukraina dan UE.